

Implementasi E- Government Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Nabilah Maulidiyah R

Isnaini Rodiyah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli , 2026



Pendahuluan

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, secara bertahap dimulai pada tahun 2017 dengan pendekatan hybrid yang menggabungkan manual pencatatan menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi SISKEUDES versi offline, sebagai langkah transisi strategi dari sistem pengelolaan keuangan desa konvensional menuju era digitalisasi yang lebih modern dan terintegrasi. Pendekatan ini dirancang untuk memfasilitasi pemulihan perangkat desa secara bertahap terhadap teknologi informasi, sambil tetap menjaga kelancaran operasional keuangan sehari-hari di tengah keterbatasan infrastruktur awal. Transisi tersebut semakin dipercepat melalui diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang secara tegas mewajibkan seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo untuk beralih sepenuhnya ke penggunaan SISKEUDES versi online mulai tahun 2019, dengan ketentuan koneksi internet yang stabil guna mendukung pelaporan real-time yang terintegrasi langsung hingga tingkat kecamatan dan kabupaten, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

Pendahuluan

Dalam Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam kerjasama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah secara proaktif melaksanakan program sosialisasi intensif dan bimbingan teknis (bimtek) yang komprehensif kepada seluruh aparat desa di wilayahnya, dengan tujuan utama meningkatkan kompetensi operasional dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai instrumen utama digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Upaya ini mencakup penyediaan materi pelatihan mendalam mengenai fitur-fitur aplikasi, prosedur input data real-time, serta mekanisme pelaporan terintegrasi, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa dalam menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan semangat e-Government di tingkat lokal.

Data Empiris

Berdasarkan Tabel 1, APBDes Desa Larangan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2023. Jumlah pendapatan meningkat sebesar 8,20%, sedangkan total belanja/APBDes meningkat sebesar 9,24%. Peningkatan belanja yang lebih besar menyebabkan defisit meningkat sebesar 27,36%. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian dalam perencanaan anggaran desa. Dalam penelitian ini, perubahan APBDes tidak secara langsung dikaitkan sebagai akibat penggunaan SISKEUDES, tetapi digunakan sebagai data pendukung untuk melihat kondisi pengelolaan keuangan desa, sementara implementasi SISKEUDES dianalisis melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Tabel 1 Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larangan 2025

Uraian	APBDes 2023	APBDes 2025	Perubahan
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	143.000.000,00	185.900.000,00	+30,00%
Pendapatan Transfer	1.971.739.755	2.151.262.547,50	+9,10%
Pendapatan Lain-Lain	45.200.000,00	0,00	-100%
Jumlah Pendapatan	2.160.039.755,00	2.337.162.547,50	+8,20%
BELANJA			
Belanja Pegawai	549.872.500,00	744.472.200,00	+35,38%
Belanja Barang dan Jasa	1.149.534.463,02	1.253.530.900,66	+9,05%
Belanja Modal	448.920.497,16	373.713.181,00	-16,75%
Belanja Tidak Terduga	136.000.000,00	123.800.000,00	-8,97%
Jumlah Belanja /Total APBDes	2.284.327.460,18	2.495.471.281,66	+9,24%
Surplus/(Defisit)	(124.287.705,18)	(158.308.734,16)	+27,36%
Pembiayaan Netto	124.287.705,18	158.308.734,16	+27,36%

Sumber : Diolah dari Peraturan Desa Larangan tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 dan 2025.

Penelitian terdahulu

- **Choiriyah et al. (2022)** : studi "Implementasi SISKEUDES di Desa Larangan" menemukan transisi hybrid manual-Excel ke online penuh tahun 2019, namun terkendala SDM adaptasi rendah dan bimtek massal tidak efektif karena peserta berlebih. Jaringan internet desa lambat menjadi hambatan utama menyebabkan error aplikasi, meskipun transparansi keuangan meningkat signifikan.
- **Isnaini Rodiyah (2023)** : melalui "The Effectiveness of G2G Model Through SISKEUDES" menekankan peran strategis kepala desa sebagai champion utama yang menentukan keberhasilan, dengan temuan bahwa komitmen pimpinan mempercepat adopsi meski infrastruktur terbatas.
- **Kusnadi (2024)**: meneliti efektivitas sistem keuangan digital Kabupaten Sidoarjo dan menyimpulkan SISKEUDES meningkatkan akuntabilitas, tetapi keberhasilan 70% bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi memadai.

Landasan Teori

Teori George C. Edwards III (1980)

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian

➤ Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi E-Government melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan dapat berjalan efektif di tengah kendala keterbatasan kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi yang belum stabil?

➤ Tujuan masalah

Menganalisis implementasi SISKEUDES di Desa Larangan menggunakan empat variabel Edwards III untuk mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, serta rekomendasi optimalisasi tata kelola keuangan desa berbasis digital.

Metode

Jenis penelitian :
Pendekatan kualitatif Deskriptif

Lokasi penelitian :
Di Desa Larangan kec. Candi
Kab. Sidoarjo

Teknik penentuan informan :
purposive sampling

Informan :
Ketua Desa, Sekretaris Desa &
staf pengelolaan keuangan

Jenis & Sumber Data :
Data primer (observasi wawancara)
& Data Sekunder (Studi Literatur)

Teknik pengumpulan data:
Observasi , wawancara &
Dokumentasi

Teknik Analisis Data:
pengumpulan data, penyajian data,
penarikan Kesimpulan, verifikasi

Hasil Dan Pembahasan Indikator (Komunikasi)

Hasil penelitian pada indikator menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi SISKEUDEES di Desa Larangan sudah berjalan cukup baik melalui koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat melalui musyawarah desa, rapat koordinasi, serta sosialisasi. Komunikasi tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Selain itu, pemerintah desa juga menjalin komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan BPKP melalui kegiatan bimtek dan pendampingan penggunaan aplikasi SISKEUDEES. Namun masih terdapat kendala seperti pelaksanaan bimtek yang kurang efektif karena dilakukan secara massal, sehingga tidak semua perangkat desa memahami penggunaan aplikasi secara maksimal. Kendala jaringan internet yang tidak stabil juga menghambat komunikasi dan koordinasi berbasis digital. Berdasarkan teori George C. Edwards III, komunikasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami menjadi faktor penting keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelatihan dan koordinasi agar implementasi SISKEUDEES berjalan lebih optimal.

Hasil Dan Pembahasan Indikator (Sumber daya)

Hasil penelitian pada Indikator menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi SISKEUDES di Desa Larangan masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek SDM dan infrastruktur teknologi. Meskipun perangkat desa memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, kemampuan teknis penggunaan aplikasi SISKEUDES belum merata dan masih bergantung pada satu operator utama. Selain itu, jaringan internet yang tidak stabil sering menyebabkan gangguan pada aplikasi sehingga menghambat proses pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Pelaksanaan bimbingan teknis dari pemerintah daerah dan BPKP juga dinilai belum maksimal karena dilakukan secara massal. Berdasarkan teori George C. Edwards III, sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan serta perbaikan sarana teknologi dan jaringan internet agar implementasi SISKEUDES berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

Hasil Dan Pembahasan Indikator (Disposisi)

Hasil penelitian pada indikator menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam penerapan SISKEUDES di Desa Larangan sudah cukup baik. Aparatur desa memiliki komitmen dan kemauan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa juga memberikan dukungan penuh serta mendorong perangkat desa untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi digital. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta gangguan jaringan internet dan sistem yang mempengaruhi kelancaran penggunaan aplikasi. Berdasarkan teori George C. Edwards III, disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi teknis, motivasi, dan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi SISKEUDES dapat berjalan lebih optimal, transparan dan akuntabel.

Hasil Dan Pembahasan Indikator (Struktur Birokrasi)

Hasil penelitian pada indikator menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam penerapan SISKEUDES di Desa Larangan sudah cukup jelas melalui pembagian tugas antara kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan operator SISKEUDES. Pemerintah desa juga telah menerapkan SOP mulai dari perencanaan anggaran, penginputan data, verifikasi, hingga pelaporan keuangan desa sehingga mendukung pengelolaan APBDes yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, musyawarah desa bersama BPD menjadi bagian penting dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan SDM yang memahami aplikasi SISKEUDES, ketergantungan pada satu operator utama, serta gangguan jaringan internet dan sistem yang mempengaruhi koordinasi birokrasi. Berdasarkan teori George C. Edwards III, struktur birokrasi yang efektif memerlukan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, dan prosedur kerja yang terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi SDM dan pemerataan tugas agar implementasi SISKEUDES dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penerapan E-Government melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Implementasi SISKEUDES membantu proses perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara lebih sistematis dan terintegrasi. Berdasarkan teori George C. Edwards III, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman teknologi, pelatihan yang belum maksimal, serta jaringan internet yang kurang stabil. Secara keseluruhan, implementasi SISKEUDES telah mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih modern dan akuntabel, namun tetap diperlukan peningkatan kualitas SDM, infrastruktur teknologi, dan koordinasi antar perangkat desa agar penerapannya lebih optimal dan berkelanjutan.

Referensi

1. Aprianty. (2016). E-Government: Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas . Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 45-56.
2. Choiriyah, F., dkk. (2022). "Implementasi SISKEUDES di Desa Larangan: Tantangan Adaptasi SDM dan Infrastruktur". Jurnal Pemerintahan Daerah , 10(1), 23-35.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sidoarjo. (2025). Laporan Implementasi SPBE Tahun 2024 . DPMD Sidoarjo.
4. Fristanti Choiriyah. (2025). "SISKEUDES sebagai Implementasi SPBE di Tingkat Desa". Jurnal Kebijakan Publik , 12(1), 78-89.
5. Choiriyah, F., dkk. (2023). "Efektivitas Model Pemerintah ke Pemerintah Melalui SISKEUDES". Jurnal E-Government Indonesia , 7(3), 112-125.
6. Kadek Ginanthi Asih. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi . Jurnal Akuntansi Desa, 5(2), 67-78.
7. Kusnadi. (2024). "Efektivitas Sistem Keuangan Digital di Kabupaten Sidoarjo". Jurnal Administrasi Lokal , 15(4), 201-215.

